



PERJANJIAN KINERJA
DAN KOMITMEN PENGAWALAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil, serta pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sally Salamah
Jabatan : Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muhammad Yusuf Ateh
Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dan berkomitmen melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan APP tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan APP dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Muhammad Yusuf Ateh
NIP. 19640809 198503 1 001

Yogyakarta, 10 Desember 2021
Pihak Pertama,

Sally Salamah
NIP. 19670420 198703 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA**

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
1		2	3	4	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah	1.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik	Jumlah	31
		1.2	Persentase efisiensi biaya pada badan usaha	Persen	4
		1.3	Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat	Persen	40
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	Jumlah	31
		2.2	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah	30
3	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	3.1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	25
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional	4.1	Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Persen	40
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D/ BLUD	5.1	Persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik	Persen	32
		5.2	Persentase BUMD dengan tata kelola korporasi baik	Persen	1,56
		5.3	Persentase BUMD dengan Kinerja Sehat	Persen	31
		5.4	Persentase BLUD dengan Kinerja Sehat	Persen	14
		5.5	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan	Jumlah	1.935
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha	6.1	Persentase K/L dengan MRI \geq Level 3	Persen	33
		6.2	Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Persen	67
		6.3	Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Persen	67
		6.4	Persentase BU dengan MRI \geq Level 3	Persen	24,71
			- BUMN	Persen	32,79
			- BUMD	Persen	28,66
	- BLU/BLUD	Persen	15,78		
	6.5	Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Persen	9,28	
	6.6	Persentase BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Persen	1,32	

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Deputy Bidang Akuntan Negara	6.7	Persentase BLU dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Persen	6,55
		7.1	Nilai Skor Zona Integritas Deputy Bidang Akuntan Negara	Skor Skala 100	77
		7.2	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Persen	100
		7.3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
		7.4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Deputy Bidang Akuntan Negara	Persen	100
		7.5	Nilai SAKIP Deputy Bidang Akuntan Negara	Skor Skala 100	82
		7.6	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Deputy Bidang Akuntan	Level skala 1- 5	3
		7.7	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Deputy Bidang Akuntan Negara)	Level skala 1- 5	3
		7.8	Indeks Kualitas Layanan Internal Deputy Bidang Akuntan Negara	Indeks Skala 100	81
		7.9	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Deputy Bidang Akuntan Negara	Indeks Skala 100	70

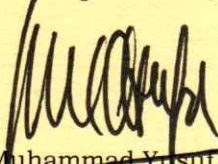
Kegiatan

1. Pengawasan Pembangunan
 2. Dukungan Manajemen
- Jumlah

Anggaran

Rp	12.063.180.000,00
Rp	1.375.000.000,00
Rp	<u>13.438.180.000,00</u>

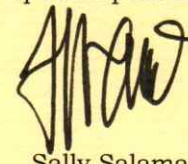
Kepala BPKP,



Muhammad Yusui Ateh
NIP.19640809 198503 1 001

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Deputi Kepala BPKP,

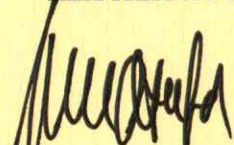


Sally Salamah
NIP 19670420 198703 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG AKUNTAN NEGARA
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN

SEKTOR		TEMA		TOPIK WAS	TW I	TW II	TW III	TW IV	
C	Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	C.4.	Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan		-	-	√	-	
				C.4.a.	BUMN	-	-	√	-
				C.4.b.	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD)	-	√	-	-
				C.4.c.	BLU/BLUD (Fokus pada BLU/BLUD Kesehatan dan BLU/BLUD Pendidikan)	-	-	√	-

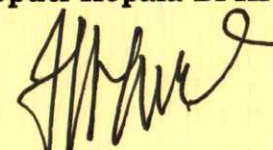
KEPALA BPKP



Muhammad Yusuf Ateh
NIP. 19640809 198503 1 001

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Deputi Kepala BPKP



Sally Salamah
NIP. 19670420 198703 2 001